

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan renaissans pada awal pertumbuhannya terjadi di Italia, khususnya di kota-kota perdagangan seperti Florence dan Milan. Renaisans inilah yang telah melahirkan Leonardo da Vinci, Michael Angelo dan Niccolo Machiavelli serata ditandai oleh berbagai perubahan besar dalam gagasan, mentalitas, agama, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa renaissans peradaban dan kebudayaan eropa barat bangkit dari keadaan statis. Kebangkitan utama dimulai dari Italia kira-kira pada tahun 1300 dan memuncak pada tahun 1500 pengaruh tersebut tidak lama kemudian menyebar kebeberapa Negara-negara lain di eropa. Pada masa transisi menuju abad renaissans kontelasi politik Roma berada dalam sebuah kondisi serba ketidakpastian, kekacauan terjadi dimana-mana, penghianatan, peperangan dan kondisi masyarakat yang korup. Hal tersebut diperparah lagi dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan dengan tangan besi oleh keluarga Medici.¹

Selain itu, Negara ini menjadi lahan perebutan Negara-negara besar seperti Jerman, Spanyol, dan Perancis dengan tujuan untuk memperluas pengaruh hegemoninya dan roma dalam hal ini adalah Italia ketika itu terbagi menjadi 5 (lima) Negara yang lebih besar yakni; kerajaan Naples di sebelah selatan,

kepangeranan Milan di barat laut, Republik Venesia di timur laut, Republik Florence dan negara Paus di tengah-tengah.

Bersamaan dengan masa tersebut muncullah seorang sosok pemikir modern ternama yakni Niccolò Machiavelli (1469-1527), seorang pelopor utama pemikiran teori-teori politik modern yang sekularistik. Sudah pasti bahwa corak pemikiran jauh berbeda dengan pemikiran sebelumnya, misalnya pada jaman klasik dan dalam abad pertengahan. Pada zaman tersebut kekuasaan di dunia dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Tuhan, dan kekuasaan Raja (penguasa) diinterpretasikan sebagai titisan para dewa (perpanjangan tangan dari keberadaan Tuhan). Machiavelli dalam pandangan politiknya tidak sepakat dan bahkan cenderung bertentangan dengan syarat konsep kepemimpinan politik yang dibangun dan ditentukan oleh pemikir pada masa itu atau sebelumnya yang di sandarkan pada kriteria Agama.

Machiavelli yang lahir dan hidup di Firenze, Italia dianggap juga sebagai pelopor pemikiran konsep Negara sebagai karya seni. Dalam konsep Machiavelli itu, keputusan-keputusan politis bukan ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria agama atau moralitas, akan tetapi atas dasar kriteria politik murni. Untuk pertama kali pula digunakannya *raison d'état* sebagai penjelasan dan pembenaran tindakan-tindakan politik. Pertimbangan kebaikan dan nilai-nilai moralitas, menurut Machiavelli bisa dikesampingkan demi mencapai keberhasilan dari tujuan kebijakan politik sebab dengan kelengkapan soal keadilan bisa

diwujudkan.² Bisa juga dikatakan pertimbangan moral, etika, dan agama dianggap tidak relevan dalam kehidupan berpolitik pada saat itu.

Machiavelli dibesarkan dalam sebuah kondisi kehidupan dimana tradisi kekuasaan yang sudah mengalami pendrobakan religius. Wajah sang Raja yang suda bertahun-tahun digambarkan sebagai sesuatu yang takjub dan menakutkan serta menggetarkan berubah menjadi sosok seorang manusia yang biasa-biasa saja. Latar belakang pemikiran politik Machiavelli diwarisi paham kekuasaan dan tradisi agama Yahudi-Kristen yang menolak identifikasi dari pengaruh wilaya Ilahia dan menempatkannya dalam tata tertib kehidupan manusia biasa. Selain itu Machiavelli dipengaruhi oleh tradisi kekusaan Yunani yang juga mengalami pendrobakan atas religius.³ Kekuasaan bagi masyarakat Yunani, kelak menjadi akar paham kekuasaan barat, merupakan wadah organisasi rasional masyarakat yang dikelola untuk mencapai kepentingan bersama. Pendobrakan lain yang dilakukan Machiavelli ialah mengacu pada kekaisaran di Roma, yakni kekuasaan akan menjadi sarana yang efektif untuk menegakkan keadilan, melalui jalur-jalur sistem hukum yang diberlakukan untuk mengontrol kesewenang-wenangan dalam praktek kekuasaan dan hak asasi manusia yang konkret. Dan ia membersihkan paham kekuasaan dari jerat legitimasi religius dengan tujuan menciptakan tatapemerintahan yang kuat.

Dalam seni perang (*The Art of War*), Machiavelli merumuskan keterkaitan erat antara kekuatan militer dan tatanan masyarakat sipil. Ia mendobrak pendapat

² *Ibid*, Bab. III, Hal. 662

³ Pemahaman Yunani ketika itu memisahkan secara signifikan antara wilaya kekuasaan dengan agama masing-masing pada wilayahnya tersendiri, penetapan criteria kekuasaan politik tidak lagi

ketika itu bahwa keduanya saling kontradiktif, menurut dia yang mengacu pada sejarah pemikiran Yunani Kuno, deduanya tidak perlu bertentangan. Seni, ilmu pengetahuan, agama, tatanan sipil tergantung pada keamanan yang diberikan dari pihak militer. Bahkan kadang-kadang Machiavelli menggunakan kata-kata *principe*, penguasa, pangeran untuk menyebutkan angkatan bersenjata dan juga masyarakat sipil

Karya-karya besar pemikiran politik diakui dunia termasuk juga karya Machiavelli. Petikan-petikan politiknya, terlepas setuju atau tidak, ditangkap seluruh atau separu, menjadi acuan para politisi dan kajian para pemikir dan filosofi politik. Dalam sejumlah karyanya Machiavelli menjadi sosok yang tidak puas-puasnya di perbincangkan oleh sederetan pemikir politik sesudahnya bahkan sampai pada akhir ini. Petikan-petikan pemikiran politik dalam setiap lembaran karyanya melahirkan berbagai kontroversi terhadap sosok yang satu ini, ada sebagian pemikir yang mengatakan bahwa Machiavelli bukanlah seorang sosok yang patut diteladani sebagai pemikir dan perjuangan politik, dia dikatakan amoralis, yang menganjurkan metode berpolitik tanpa pertimbangan etika, melaikan sebagai guru *Par excellence* penipuan dan penghianatan politik, sebagai inkarnasi dari kekuatan licik dan brutal dalam dunia politik, dan sebagai penggagas totalitarisme modern. *Iago* Shakespeare dianggap dibuat dengan meniru dirinya, dan Nicolo, yang berubah menjadi Nik tua menjadi nama yang secara serentak bisa diterapkan pada Machiavelli dan kejahatan itu sendiri. Bagi

Dilain pihak, peletak dasar politik baru ini dipuji sebagai pahlawan Italia yang nasionalis, yang bersemangat mengabdikan dirinya bagi kebaikan umum warga negaranya, sebagai demokrat besar, dan sebagai pemikir yang memberikan sumbangsi besar pada kebebasan manusia dan nasib manusia dengan membebaskan filsafat politik dari belenggu masa lampau. Ia adalah seorang yang meletakkan dasar konsepsi Negara beserta alasan kehadirannya, *raison d'etat*.⁴

Dia dikenal terutama dengan karyanya *The Principe* (Sang Penguasa). Buku itu ditulis pada tahun 1513 sesudah Machiavelli dipecat dari jabatannya sebagai sekretaris Departemen II Republik Firenze, sudah dicaci maki begitu orang membacanya. Dalam *The Principe*, Machiavelli mengembangkan teknik-teknik untuk merebut dan mempertahankan atas kekuasaan politik. Demi pencapaian tujuan tersebut, sang penguasa jangan dihambat oleh norma-norma moral, kalau perlu dia harus bersikap kejam, tidak takut berbohong, bersedia membunuh dan dibunuh, dan jangan merasa terikat dengan sebuah ikrar dan janji dan atau ikatan budi. Seorang penguasa bermurah hati atau berbaik hati tidak akan memberikan apa-apa alias terperdaya, dengan pemikiran seperti inilah Machiavelli mencoba bangkit dari keterpurukan politik pada masa itu. Karakter atau ciri khas dari konsep politik Machiavelli adalah bersifat radikal, oportunistis, dan pragmatis yang kemudian pandangannya menghalalkan berbagai cara dengan mengabaikan agama dan moralitas demi memperoleh kekuasaan politik. Jadi demi mencapai kekuasaan tersebut penguasa dibolehkan bisa menipu, licik, many politic, repressif

⁴ *Raison d'etat* merupakan sebuah kekuatan batin dalam *virtu* (keutamaan) sikap mempertahankan

B. Perumusan Masalah.

Sebelum menarik rumusan masalah, terlebih dahulu akan dijabarkan pengertian masalah itu sendiri. Menurut Moh. Hatta masalah adalah kegiatan atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Masalah sangat erat kaitannya dengan ilmu, masalah menimbulkan hal yang harus diterangkan oleh ilmu, senantiasa mengemukakan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya.⁷ Sedangkan pengertian masalah menurut Winarno Surahman adalah sebagai kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan yang harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kesulitan terus berjalan.⁸

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masalah berarti merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mengandung keragu-raguan atau ketidakpastian yang bersifat tegas dan tepat untuk segera disekapi sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagai penjelasan petikan-petikan pemikiran politik Niccolo Machiavelli, maka muncullah sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran politik Niccolo Machiavelli tentang:
 - a. Konsep Kekuasaan yang mencakup: Kekuasaan dan Persoalannya, Cara Memperoleh dan Mempertahankan Kekuasaan, Kekuasaan dan Penguasa, Legitimasi Sebuah Kekuasaan, Sekulerisasi Politik.

⁷ Moh. Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu pengetahuan*, PT. Mutiara, Jakarta, 1935. Hal. 14

⁸ Winarno Surahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Laporan*, 1970. Hal.

- b. Relasi Kekuasaan yang terdiri dari: Hubungan Agama dan Kekuasaan, Moralitas dalam Kekuasaan, hubungan militer dan kekuasaan serta Watak dan Pertahan Negara?
2. Bagaimana hubungan pemikiran politik Niccolo machiavelli dan praktek politik di Indonesia pada masa orde lama, baru dan reformasi?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul Stady Komparatif Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli dan Praktek Politik di Indonesia dibatasi dan difokuskan pada pemikiran-pemikiran politik bagaimana memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan dan praktek politik di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Lazimnya dalam penelitian sosial, setelah indentifikasi atau perumusan masalah ditemukan, maka ini berarti kita telah mendapatkan inti dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah berkenaan dengan apa yang hendak dicapai dan memberikan maksud agar kita dan pihak lain yang membaca hasil penelitian dapat mengetahui dengan jelas dan pasti tujuan sesungguhnya dari penelitian yang dilakukan.⁹

1. Tujuan penelitian terdiri dari:

- a. Menenal lebih dalam sosok Niccolo Machiavelli dan pemikiran politiknya
-

- b. Disamping itu juga bertujuan untuk menjelaskan defenisi, tujuan dan maksud dari konsep pemikiran politik Machiavelli tentang kekuasaan dan Pengaruhnya di Indonesia.
- c. Seperti apakah hubungan konsep politik yang dipakai oleh Machiavelli dalam memperoleh kekuasaan, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan dengan praktek politik di Indonesia.

2. Manfaat penelitian:

- a. Menjadikan Politik Machiavelli sebagai pegangan dan pembelajaran bagi segenap mahasiswa dan elit politik.
- b. Memperkaya wacana politik bagi penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya, terutama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (kosentrasi pemikiran politik).

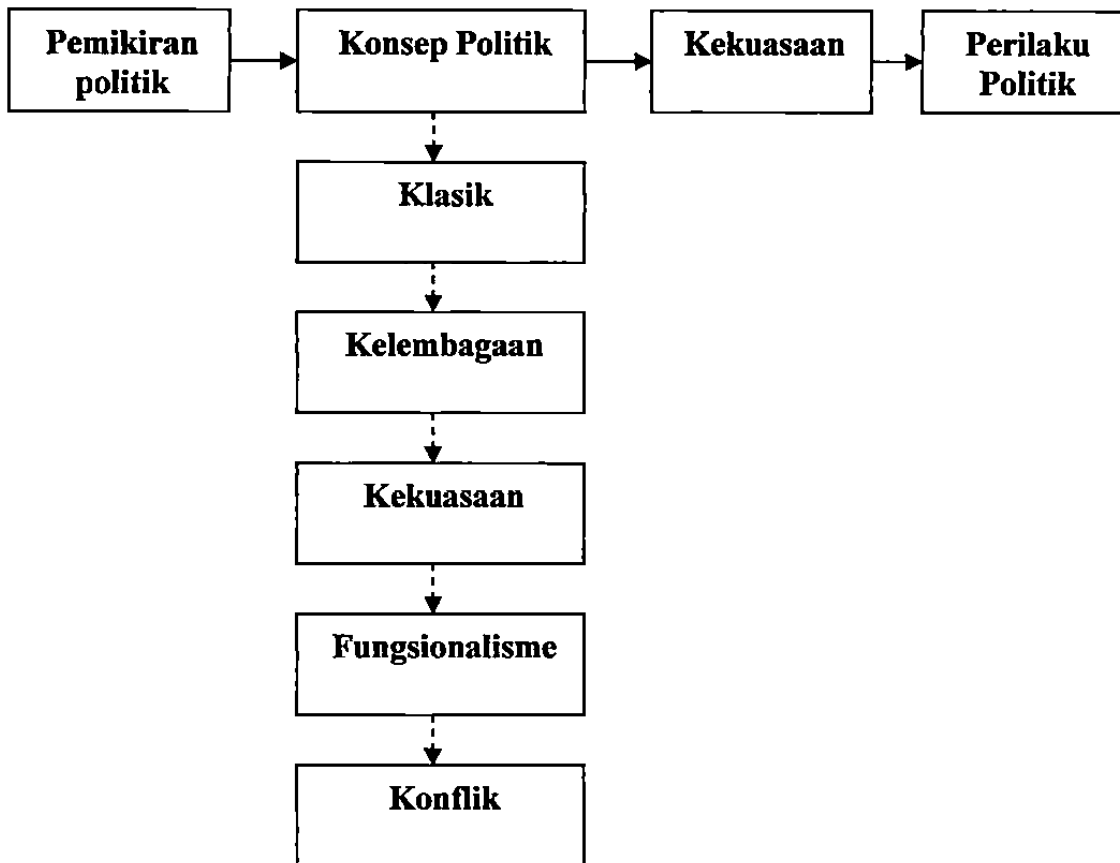
E. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemikiran Niccolo Machiavelli, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan politik, sedangkan jangkauan pembahasannya adalah pada pemikiran politik Machiavelli yang berhubungan dengan konsep kekuasaan dan praktek politik di indonesia.

F. Kerangka Dasar Teori

Untuk memahami masalah yang akan diteliti maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori. Sebelum melangka lebih jauh dipandang perlu menjabarkan beberapa pendapat para ahli tentang teori

Bagan Kerangka Teori



1. Pemikiran Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dari pemikiran manusia dan karena itu beresifat abstrak; meskipun fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai batu loncatan.

Teori (*theory*) meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran; teori diharapkan dapat memberikan petunjuk. Dalam bentuk yang sederhana, teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematis. Secara spesifik, teori adalah kumpulan generalisasi dan prinsip-prinsipnya yang koheren, logis

dan saling berkaitan) mengenai praktek atau sesuatu yang menjadi objek telaah (*inquiry*). Segenap generalisasi dan prinsip ini bisa bersifat hipotesa maupun konseptual. Deskripsi (*description*) adalah pernyataan mengenai bagian-bagian atau hubungan-hubungan dari sesuatu hal, yang bisa dirumuskan melalui klasifikasi, identifikasi, dan spesifikasi. Analisa (*analysis*) adalah pemisahan atau pemecahan suatu keseluruhan utuh menjadi bagian-bagian pokok, lalu masing-masing dari bagian itu dikaji secara kualitatif atau kuantitatif. Analisa juga bisa dilakukan dengan klasifikasi dan penjelasan secara terperinci. Sedangkan sintesis (*synthesis*) adalah penggabungan dari bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang utuh, atau memadukan berbagai gagasan dan rumusan menjadi suatu kompleksitas atau suatu pemikiran yang koheren. Secara umum semua ini merupakan aspek-aspek dari teori dan telaah.¹⁰

Menurut Miriam Budiardjo¹¹ teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas, a) tujuan dari tujuan politik, b) cara-cara mencapai tujuan tersebut, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul oleh situasi politik tertentu, d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas social, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan social, pembangunan politik, modernisasi, globalisasi dan sebagainya.

¹⁰ Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan politik Penelusuran Paradigma*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003, Hal. 21

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, Hal. 20-22

Sementara itu dalam keterangan penjelasan lain Thomas P. Jenkin seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, membagi dua macam teori politik.

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh dinamakan mengandung nilai. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
 - a. Filsafat politik, teori ini mencari penjelasan yang menitik beratkan pada kekuatan rasio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metaphysika dan epistemologi terlebih dahulu harus dipecahkan sebelum persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya kata Plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik.
 - b. Politik sistematis, teori ini berbeda dengan filsafat politik, ia berdasarkan pada pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima maasa itu. Jadi ia tidak menjelaskan asal muasal lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik (pemilu). Teori ini bisa dikata sebagai lanjutan dari filsafat politik.
 - c. Ideologi politik, dalam teori ini adalah mengandung sejumlah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan akan mempengaruhi orang itu atau mereka untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan ideology yang ada, misalnya ideology kapitalism akan merekomendasikan seseorang ke

wilaya kapital. Nilai-nilai dan ide ini merupakan suatu system yang sempurna. Dasar dari ideology politik adalah keyakinan adanya suatu pola system tata tertib sosial politik yang ideal, ideology politik juga mencakup pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan yang ideal tersebut. Ideology mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (satu visi, satu misi dan satu aksi).

2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dapat diklasifikasikan dan dinamakan bebas nilai. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan).

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia berdasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidah akan sumber pandangan umum dan system kepercayaan. Jadi pemikiran politik adalah macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat politik itu sendiri.¹² Pemikiran politik dalam kajiannya tidak terlepas dari kajian ilmu politik, yakni mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan Negara dan warga Negara dan hubungan international. Namun perlu diketahui apa itu masyarakat politik dan apa itu politik...? Suatu masyarakat dikatakan

¹² Menurut ...

masyarakat politik jika ia mempunyai lembaga kekuasaan (politik) yang khusus, undang-undang, hukum yang mengatur masyarakat. Pengaturan itu dilakukan atas dasar relasi Negara dengan masyarakat dan itu merupakan konsekwensi dari kehidupan berpolitik. Kemudian undang-undang dan hukum itu diaplikasikan kepada masyarakat dan memaksakan mereka untuk mematuhi. Lalu undang-undang itu dipatuhi secara umum oleh masyarakat dan diakui mempunyai kekuatan secara sukarela maupun terpaksa, dan juga diakui sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat itu dan dapat memberikan material.¹³ Sedangkan, politik didefinisikan dalam kamus Litre (1870) adalah ilmu memerintah dan mengatur Negara.¹⁴ Dan dalam kamus Robert (1962) didefinisikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.¹⁵ Namun dalam definisi modern mencakup pengaturan Negara dan mengatur pola hidup masyarakat manusia, sehingga kata memerintah dan mengatur mengandung arti hubungan yang memerintah dan yang diperintah atau yang memimpin dan yang dipimpin berada dalam satu wilayah organisasi kekuasaan tunggal yang namanya Negara. Dan akan diperjelas kembali pada konsep politik.

2. Konsep Politik

Dewasa ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir dimana-mana, termasuk disekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun bagian dari sekelompok

¹³ Terjemahan bebas dari Tim Maula, dalam *Jika Rakyat Berkuasa*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1997, Hal. 55

¹⁴ Dikutip dari Mardiana, Dandana, dalam *Politik dan Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1997, Hal. 55

masyarakat. Hal tersebut berlangsung semenjak manusia itu lahir sampai mati, tidak peduli apakah kita ikut mempengaruhi politik atau tidak? Karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang maka Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan *master of science*.

Maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan (*scientific*), tetapi ia menganggap tentang politik merupakan kunci utama dalam memahami lingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi yang terpenting sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia, selanjutnya politik berarti mengatur apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak lakukan. Penjelasan ini menyadarkan kepada kita akan pentingnya mempelajari politik.

Jika dianggap bahwa ilmu politik membicarakan dan mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas dulu istilah politik itu. Dalam kepustakaan ilmu politik terdapat sejumlah definisi tentang politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan sistem tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Ada tiga cara yang pernah digunakan untuk menjelaskan pengertian politik.

Definisi politik menurut Aristoteles

Dalam hal ini Paul Conn menganggap konflik sebagai esensi politik.¹⁶ Kedua, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Dalam kaitan ini, Harold Lasswell merumuskan “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.¹⁷ Ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami apa itu politik.

Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics*, melihat ilmu politik mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan Negara dan warga Negara, serta dengan Negara lain.¹⁸

J. Barents, dalam Ilmu Politika: ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan Negara.....yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari Negara itu melaksanakan tugas-tugasnya¹⁹

Sejak awal hingga perkembangan dewasa ini ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo, 1992, Hal.1

¹⁷ *Ibid*, Hal. 2

¹⁸ ...

mempertahankan sumber-sumber politik yang dianggap penting. Kelima pandangan dalam melihat politik diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Klasik

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles,²⁰ pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga Negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat (kepentingan umum). Ilmuwan politik kontemporer, Samuel P. Huntington melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintahan dibentuk untuk penyelenggaraan kebaikan bersama.²¹ Berpolitik ialah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan diikuti serta dalam upaya mengejar tujuan bersama, barangkali aspek filosofis inilah menjadi kelebihan dan merupakan ciri khas dari pandangan klasik.

2.2. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Max Weber merumuskan Negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan persaingan untuk pembagian kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar Negara maupun antar kelompok di dalam suatu Negara. Menurutnya, Negara merupakan suatu bentuk struktur administrasi atau organisasi yang kongkret, dan dia membatasi Negara semata-mata sebagai

²⁰ Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Jakarta, Visimedia, 2007, Hal. 3

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grafindo, 1999, Hal. 3

paksaan fisik yang digunakan untuk sebuah ketaatan. Maka disini kita dapat menyimpulkan tiga aspek sebagai ciri Negara, yaitu:

1. Sebagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti jabatan, peranan, dan lembaga-lembaga, yang semuanya memiliki tugas dan batasan yang jelas, yang bersifat kompleks, formal dan parmanen.
2. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh Negara. Negara memiliki kewenangan yang syah untuk dapat membuat keputusan yang final dan mengikat seluruh warga Negara. Para pejabatnya mempunyai hak untuk menegakkan putusan itu seperti memberikan hukuman dan menanggalkan hak milik. Dalam hal ini, untuk melaksanakan kewenangan itu Negara menggunakan aparaturnya seperti polisi, militer, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan; dan
3. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas kedaulatan wilayah Negara tersebut.

2.3. Kekuasaan

Pandangan ketiga ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakekat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan.

Robson merumuskan politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan,

pelaksanaan kekuasaan.²² Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan. Menurut pandangan ini kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

2.4. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Diantara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah ²³David Easton dan Harold Lasswell. David Easton merumuskan politik sebagai *The authoritative allocation of values for a society*, atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. sementara itu Harold Lasswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah *Who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.²⁴

2.5. Konflik

Menurut pandangan ini, politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tidak lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak.

²² *Ibid*, Hal. 6

Dalam hal ini antara pihak yang berupaya keras mempertahankan kekuasaan dan pihak yang ingin memperoleh nilai-nilai kekuasaan. Jadi konflik adalah hakekat dari politik.

3. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga orang atau kelompok itu dapat melakukan apa yang kita inginkan atau keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Karena manusia adalah mahluk social maka yang dimaksud dengan kekuasaan di sini adalah kekuasaan sosial.

Kekuasaan menurut Ossip K. Flechtheim adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan-ketatan dari pihak lain...untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Sedangkan Robert M. Mac Iver; kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah-laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberikan perintah, maupun dengan secara tidak langsung dengan menggunakan segala dan cara yang tersedia²⁵ Kekuasaan merupakan sentral dalam ilmu politik. Perdebatan mengenai konsep kekuasaan belum juga berhenti dan bahkan cenderung menunjukkan gejala yang semakin intens dan luas. Dalam mendefenisi kekuasaan ada beberapa pendapat dari Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (dalam buku teori politik) merumuskan kekuasaan sebagai; *"kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian*

²⁵ *Ibid*, Hal. 35

rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan."²⁶

Van Doorn (1957) melihat kekuasaan adalah "kemampuan pelaku untuk menetapkan secara mutlak alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih pelaku lain."

Robert Dahl seorang pluralis dan Steven Lukes dari kubu radikal kekuasaan didefinisikan; "*A has power over the extent that he/she can get B to do something that B would not otherwise do*"

Peter Bachrach dan Morton Baratz melihat kekuasaan tidak memiliki satu wajah melainkan dua wajah yang tercermin dalam pembuat keputusan.²⁷

Dalam konteks politik, Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan adalah sebagai sesuatu yang cenderung dilanggengkan oleh setiap penguasa lewat berbagai cara. Cara apapun yang digunakan tidak menjadi persoalan, yang terpenting adalah kekuasaan itu dalam kenyataannya dapat direbut, dikembangkan dan dipertahankan.²⁸

Dari sejumlah pendapat diatas disimpulkan bahwa kekuasaan dapat didefinisikan kemampuan seseorang atau kelompok orang dengan tujuan mempengaruhi orang lain bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan, menetapkan, mengatur, mengorganisir, menggerakkan, dan lain-lain sebagainya demi untuk mencapai atau memperoleh kekuasaan politik.

²⁶ DRA. Ratnawati Dkk, *Modul Teori Politik*, Yogyakarta, UGM, 2005, Hal. 12

²⁷ Ibid, hal. 13-15

²⁸ Yogyakarta, Pustaka Widada, 1997, Hal 1

4. Perilaku Politik

Perilaku merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi, tertentu yang berhubungan dengan objek sikap.²⁹ Maka perilaku erat sekali hubungannya dengan sikap.

Komponen perilaku atau konasi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.³⁰

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek tertentu.

Perilaku politik merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen-komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu aksi tertentu yang berkaitan dengan objek sikap. Sikap bisa diartikan sebagai keyakinan yang telah melekat yang mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi dengan cara tertentu. Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan, para pemimpin, gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa politik. Suatu sikap yang bersifat kejiwaan boleh jadi bisa dan tidak dapat dicerminkan dalam tindakan-tindakan politik yang nyata. Walaupun sikap lebih abadi dari pada keadaan pikiran ataupun suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah seiring waktu dan perubahan keadaan, dan cenderung

²⁹ Jack Duncan, *Organizational Behavior*, Houton Mifflin Company, 1981, Hal. 92

³⁰ G. L.
³⁰ G. L.
³⁰ G. L.

dipengaruhi oleh berbagai motif. Ideology merupakan sekumpulan sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sifat manusia dan masyarakat yang mendorong tingkalakunya dalam urusan-urusan politik, ekonomi dan social. Sikap membentuk cara, rakyat mengalami dan merasakan gejala politik, oleh karenanya politisi dalam menjalankan program sosialnya harus sesuai atau selaras dengan tatanan social masyarakat yang ada atau membentuk perubahan sikap yang akan memberikan dukungan. Namun jangan merubah sikap yang keterlaluan dengan aksi manipulatif akan mengandung sikap yang *counterproductive*.

Pola-pola tingkalakku manusia memberikan dasar bagi pengkajian politik yang ilmiah. Pola tingkalaku politik bisa saja terbentuk dari posisi yang paling dalam dari manusia berupa tanggapan-tanggapan psikologis (fikiran, pertimbangan, pendapat, keakinan) sampai ke yang terbuka yaitu tanggapan-tanggapan yang bersifat fisik yang kelihatan (konsolidasi, berperang, pidato politik).

Perilaku dapat diartikan dari suatu pendekatan yang menekankan penerapan metode dan pandangan ilmiah terhadap pengkajian politik dan pemerintahan. Perilaku atau behavioralisme lebih memusatkan pada tingka laku individu dan kelompok-kelompok yang aktual ketimbang pada peranan formal atau fungsi lembaga-lembaga dan ataupun struktur.

Perilaku politik bisa diartikan sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses politik dan pemerintahan. Yang termasuk perilaku politik

juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerakan, protes, lobiying, kaukus dan kampanye). Dalam arti yang luas, perilaku “yang bersifat politik” bisa ditemui dalam lingkungan kelembagaan (keluarga, perusahaan dan sejenisnya), tetapi istilah ini biasanya diterapkan pada kegiatan yang terjadi didalam atau melalui kelembagaan Negara. Perilaku politik juga dapat dirangcang sebagai pendekatan pada ilmu politik, yang menempatkan unit individu sebagai unit analisi utama. Perilaku politik merupakan mana yang diberikan pada pokok-pokok persoalan dalam sub bidang politik yang lain yakni kepribadian politik, sikap-sikap politik, partai-partai politik, asosiasi politik, kelompok kepentingan, budaya politik, studi elit dan kekuatan masyarakat, sehingga perhatian sosiologi politik tercakup pada sub bidang politik. Dalam pengertian yang lebih umum, perilaku politik kadang-kadang disamakan dengan studi mengenai tingka laku politik.

Secara umum perilaku politik adalah masalah pokok ilmu politik, bahkan lembaga-lembaga politik secara sederhana merupakan tingkalaku yang sudah terpola. Sebagai pendekatan utama untuk sebuah studi ilmu politik, perhatian terhadap perilaku individu atau kelompok telah memperkaya dimensi masalah pokok yang penting didalam ilmu politik sehingga mengembangkan suatu prespektif yang melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti apa yang dikatanan oleh Aristoteles pada lembaran sebelumnya.

Menurut Emmanuel Subangun membicarakan perilaku politik tidak

terlepas dari pemahaman sifat dasar dari unit politik kita, memuncutnya unit terkecil

pada polity kita tidak pernah bersifat individual.³¹ Dalam perilaku politik individu sudah terjadi sejak dahulu kala dan itu berulang kembali pada masa renaisans. Pertanyaan sentral dalam tradisi perilaku politik adalah kenapa seorang politisi dapat berbuat apa saja demi mencapai apa yang diinginkan dalam hidupnya. Para pakar politik kontemporer mencoba menjelaskan akan hal tersebut, kesimpulanyapun bermacam-macam pulah, ada yang mengatakan karena tuntutan hidup, ekonomi, kebebasan dan lain-lain sebagainya.

Perilaku politik dalam sudut pandang sosiologi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku sosial atau tindakan sosial utama yang berkaitan dengan kehidupan politik (Welburn, 1978: 4). Oleh karena itu, tindakan sosial disini mempunyai arti yang luas, menyangkut semua kelompok sosial, perilaku sosial dan akses kepentingan baik itu secara kolektif maupun secara individual. Sosiologi politik mempelajari pengaruh gejala politik dan pengaruh aspek-aspek lain dari masyarakat. Pendekatan makro dari masyarakat secara menyeluruh bersentuhan dengan dasar-dasar kekuasaan masyarakat, dampak konflik dari kelas social, dengan kelompok terhadap lembaga-lembaga politik, dan pengaruh timbal balik antara lembaga-lembaga politik dengan stratifikasi social (kelas) dan kelompok. Sedangkan pendekatan mikro sosiologi politik dipusatkan pada lembaga-lembaga politik tertentu, seperti organisasi social beserta tatanan formal dan informal, pola-pola kepemimpinan, metode pengembalian konflik, dan hubungan dengan organisasi lainnya.

Pembahasan *perilaku politik* dapat diartikan sebagai bagian yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, kegiatan politik, ada yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan fungsi pemerintah dengan kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan fungsi politik.

Jadi uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *perilaku politik* merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan perilaku politik diartikan sebagai fungsi dari kondisi social, ekonomi, dan fungsi kepentingan perilaku sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi (ekopol), dan kepentingan suatu masyarakat, atau golongan dalam masyarakat tersebut.³²

Ramlan Surbakti mendefenisikan *perilaku politik* sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga-lembaga pemerinyah, dan antar kelompok dan individu di masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.³³ Untuk mempermudah penelahan, perilaku politik dapat dilihat dari dua masalah mendasar, yaitu apa yang terjadi dan mengapa dapat terjadi.

Perilaku politik juga dapat diartikan sebagai pembuatan, perilaku, atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok masyarakat sebagai respon dari stimulasi dan pemamfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.

³² Abdul Munir Mulkam, *Perbuatan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam, 1965-1987 Dalam Prespektif sosiologi*. CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1989, Hal. 7

Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan, menurut kamus besar bahasa Indonesia 'perilaku' adalah tanggapan atau reaksi dari individu maupun kelompok yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badani atau ucapan.³⁴ Sedangkan politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang system pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan.

G. Definisi Konseptual

Seperti yang dijelaskan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu.³⁵ Konsep yang perlu didefinisikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemikiran politik didefinisikan sebagai sebuah konsepsi, gagasan, ide yang lahir dari akal pikiran manusia yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat
- b. Machiavelli adalah seorang diplomat, politisi, pemikir dan sekaligus penulis politik baru pada masa renaisance (jaman pencerahan) dengan karakter khas politiknya yang menghalalkan berbagai cara (pemisahan etika dan moral dalam politik) untuk mendapat kekuasaan.
- c. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengontrol dan mempengaruhi orang atau kelompok lain agar mengikuti

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen pendidikan dan Kebudayaan*, Balai pustaka, Jakarta, 1993, Hal. 671

³⁵ Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan (Visi, Misi, dan Aksi yang sama dari aktor politik utama).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan disini adalah jenis penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif* dimana penelitian *deskriptif komparatif* ini adalah jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus dan situasi-situasi dengan teliti. Dimana penelitian ini mencoba merangkai kenyataan menjadi sebuah cerita (*narration*), yakni menguraikan secara teratur suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis *deskriptif*, yakni suatu penelitian yang menghasilkan data secara *deskriptif* (menggambarkan) yang berupa fakta-fakta tertulis dari setiap perilaku orang-orang yang dicermati. Menurut Jalaludin Rahmat, penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.³⁷ Dengan mengumpulkan data secara *univariatif*. Metode *deskriptif* bertujuan melukiskan secara faktual dan cermat namun pelaksanaannya metode *deskriptif* tidak terbatas samapai pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisa interpretasi arti data itu. Karena penelitian bersifat *deskriptif* mampu merinci secara lengkap keadaan, gejala, atau

³⁶ Anton Bakker dan Achmad Chariss Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, Hal. 54

³⁷

kelompok tertentu. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah memilih gambaran tentang sifat-sifat dari tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya.

Penelitian ini sejenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸

Selanjutnya Masri Singarimbun, penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.³⁹ Oleh karena itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa, keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dengan demikian dalam penulisan ini, penulis berusaha mengeksplorasi berbagai fenomena dan persoalan politik yang muncul dan terjadi berhubungan dengan pemikiran politik Niccolo Machiavelli.

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, akan ditemukan salah satu unsur yang juga dianggap penting dan sebagai syarat bagi sebuah tulisan yang dianggap ilmiah, yaitu teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penulisan karya ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data dari referensi buku-buku yang ditulis oleh Machiavelli, maupun buku-buku dari hasil karya orang lain yang berkaitan dengannya. Selain itu, penulis juga menggunakan data melalui situs-situs internet yang berhubungan

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Hal. 3

³⁹ Baca Masri Singarimbun dan Sofian Effendi

dengan masalah yang dikaji. Data yang diperoleh nantinya akan di analisis dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih difokuskan pada konsep pemikiran politik Niccolo Machiavelli yang berhubungan dengan kekuasaan dan praktek politik di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dipakai dalam menyelesaikan karya ini, diperoleh dari sejumlah dokumentasi berupa:

- a. Buku-buku yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli.
- b. Buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah, ilmuan, tentang Niccolo Machiavelli, dan komentar-komentar yang muncul dari tokoh dalam bermacam artikel.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisi yang bersifat kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dikelola sedemikian rupa, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa terhadap gejala-gejala dan kondisi atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan atas dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian ini merupakan salah satu yang terpenting untuk membantu memberikan gambaran yang objektif

I. Sistematika Penulisan

Sebagai unsur penyempurnaan yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, disamping hal-hal yang telah penulis sebutkan di atas maka perlu adanya sistematika penulisan, dengan demikian penulis tidak menyalahi kaidah penulisan karya ilmiah yang telah dilakukan.

Adapun sistematika, penulisan karya ilmiah ini, terdiri beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I. Membicarakan alasan pemilihan judul, latar belakang masaah, batasan permasalahan tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, kerangka dasar toeri (konsep politik, teori pemikiran politik, perilaku politik), defenisi konsepsional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Niccolo Machiavelli dan Latar belakangnya

Pada Bab ini akan membicarakan latar belakang seorang Machiavelli bagaimana dia hidup ditengah keadaan Italia yang terpeca menjadi beberapa Negara, aktifitas politik, karier, dan karya-karyanya

BAB III. Pemikiran Politik Machiavelli Tentang Kekuasaan

Bab ini menerangkan persoalan kekuasaan menurut Machiavelli dalam sang penguasa. Persoalan kekuasaan bukan terletak pada legitimasi tidaknya kekuasaan, tetapi pada bagaimana kekuasaan diperoleh, Machiavelli sebenarnya ingin memperkenalkan unsur dinamis dalam teori politiknya Konsep tersebut bertujuan agar setiap penguasa dan atau pejuang politik senantiasa mempunyai tipikal yang dimiliki olehnya, hal inilah yang disebut dengan Machiavellisme.

Konsep-konsep politik diantaranya: kekuasaan dan penguasa sekularisasi

(desakralisasi) politik, agama dan kekuasaan, dan watak dan pertahanan Negara, hubungan militer dan kekuasaan.

BAB IV. Korelasi pemikiran Politik Machiavelli dan Praktek Politik Di Indonesia

Bab ini berbicara tentang sejauh mana hubungan pemikiran politik Machiavelli yang berkaitan dengan konsep-konsep kekuasaan dalam khasana perpolitikan di indonesia.

BAB V. Penutup

Bab terakhir dari karya ilmiah ini, akan menyimpulkan secara objektif dari sejumlah mana hubungan pemikiran Politik Machiavelli dan praktek politik di Indonesia. Akhir dari kesimpulan tersebut mengharapkan kritik, masukan berupa saran, ide, konsep yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan